

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Menurut BPS (2021) untuk mengukur kemiskinan dapat menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata – rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.

a. Penyebab kemiskinan

Secara umum, kemiskinan disebabkan oleh dua kondisi, yaitu kondisi alamiah dan kondisi buatan. Kondisi alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, rendahnya penggunaan teknologi dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi akibat lembaga – lembaga yang ada dalam masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia. Lebih detailnya, kemiskinan terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan atau kemampuan dari penduduk miskin.
- b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

- c. Penyebab sub-budaya yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan dengan sehari – hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
- d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah dan ekonomi.
- e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Dalam strategi penanggulangan kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan seseorang atau sekelompok orang, laki – laki atau perempuan yang tidak dapat memenuhi hak – hak dasarnya untuk bertahan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak – hak dasar antara lain adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, keamanan, hak untuk partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut.

b. Ukuran Kemiskinan

Banyak metode yang bisa digunakan untuk mengukur kemiskinan. Belum ada bukti indikator yang benar tepat dan sesuai yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan yang bisa diberlakukan secara umum. Metode pengukuran yang digunakan harus konsisten untuk menghasilkan data jumlah penduduk miskin yang tepat. Ukuran kemiskinan menurut Mudrajad (1997) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut, situasi atau kondisi ketidakmampuan atau nyaris tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menurut Todaro (2008), konsep kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Kemiskinan relatif, suatu keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada sisi pendapatan.
3. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang pada dasarnya disebabkan oleh mental atau nilai yang dianut, tidak ada niat usaha untuk memperbaiki taraf hidup, tidak kreatif dan tidak mau berjuang meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Bank Dunia menetapkan ukuran standar kemiskinan mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah apabila persentase pengurangan pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Apabila persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Menurut Sajogyo dalam Mudrajad (2006), ukuran kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah rupiah

pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. Seseorang dikatan miskin jika konsumsi per kapita setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan.

Menurut BPS, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2.100 kalori per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Ketentuan yang menjadi dasar kecukupan 2.100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan selalu dalam ukuran persen. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara dikatakan bertumbuh apabila aktivitas ekonomi masyarakatnya mempunyai dampak langsung kepada naiknya produksi barang dan jasa.

a. Alat ukur pertumbuhan ekonomi

Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) karena pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai penambahan pendapatan nasional atau penambahan output suatu barang dan jasa yang di produksi oleh suatu negara. PDB adalah nilai pasar dari barang dan jasa yang di produksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mankiw (2007) ukuran kemakmuran ekonomi dihitung menggunakan output barang dan jasa perekonomian dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga. Dalam hal ini ekonom menggunakan PDB riil yang nilai barang dan jasanya diukur dengan menggunakan harga konstan. Mankiw (2007) PDB riil dapat dirumuskan sebagai berikut:

PDB Riil = Output yang diproduksi tahun tertentu x Harga tahun dasar

Selain GDP riil alat ukur lain adalah GDP nominal. GDP nominal digunakan untuk mengukur produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga – harga di masa sekarang. Dalam menghitung PDB nominal dipengaruhi oleh kenaikan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Untuk mengetahui perhitungan PDB nominal maka harus mengetahui perhitungan PDB deflator. PDB deflator merupakan salah satu ukuran yang digunakan oleh ekonom untuk mengamati rata – rata tingkat harga dalam perekonomian. PDB deflator mengukur harga output relatif terhadap harganya pada tahun dasar. Mankiw (2007) berikut ini rumus untuk menghitung PDB deflator dan PDB nominal:

$$\text{PDB deflator} = \frac{\text{PDB Nominal}}{\text{PDB Riil}}$$

$$\text{PDB Nominal} = \frac{\text{PDB Nominal}}{\text{PDB Deflator}}$$

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional dapat menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh kegiatan di suatu daerah dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. PDRB dihitung berdasarkan PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku artinya nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga berlaku setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan tahun dasar. BPS menerangkan bahwa perhitungan atas dasar harga berlaku digunakan untuk menghitung pergeseran ekonomi sedangkan perhitungan berdasarkan harga konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Selain itu, bisa diukur dengan indikator lainnya yaitu pendapatan riil per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu daerah atau negara. Apabila peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dikatakan bahwa perekonomian di daerah atau negara tersebut mengalami pertumbuhan yang baik atau bisa dikatakan positif. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat serta merata di setiap daerah.

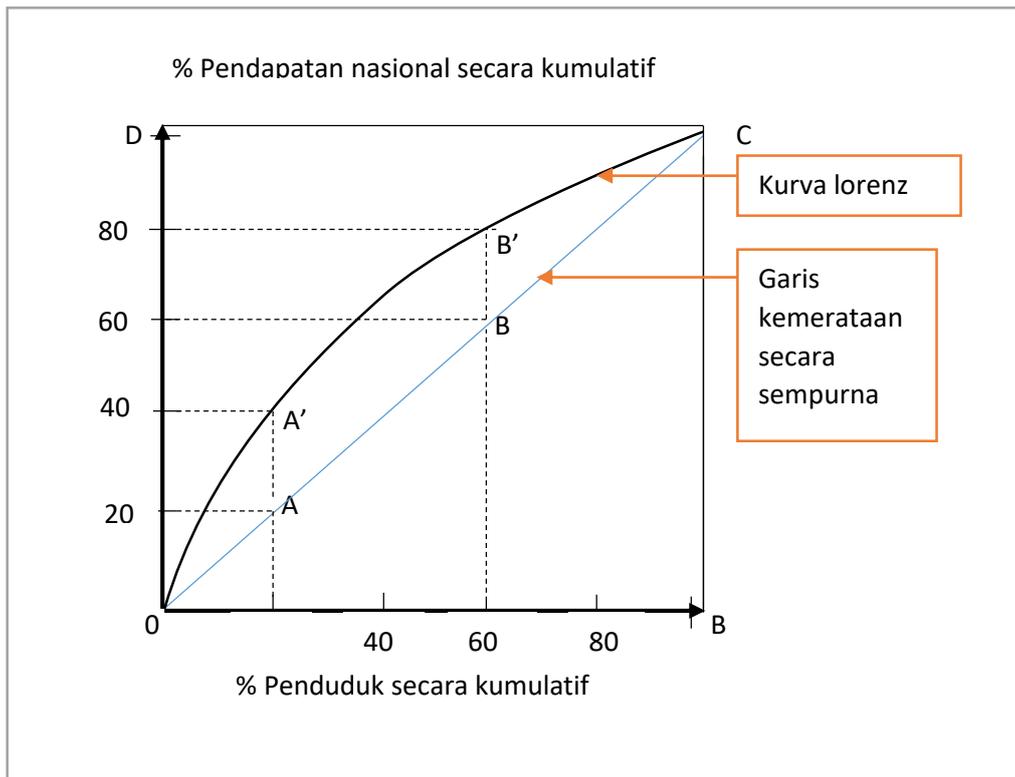
b. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan merupakan dampak secara tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk

kaya kepada penduduk miskin. Hal ini menjelaskan bahwa kemiskinan dapat berkurang dalam skala kecil jika penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang dikarenakan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibandingkan penduduk miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin.

2.1.3. Gini ratio

Gini ratio menurut BPS merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, didasarkan kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu. *Gini ratio* atau koefisien Gini digunakan untuk mengukur pemerataan juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara umum. Ukuran *gini ratio* sebagai ukuran pemerataan pendapatan yang memiliki nilai antara 0 sampai 1. Apabila *gini ratio* mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan apabila *gini ratio* mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.



Sumber: Todaro dan Smith (2011)

Gambar 2. 1

Kurva Lorenz

a. Indikator ketimpangan menurut Bank Dunia (*World Bank*)

Bank Dunia menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Berikut ini adalah kriteria distribusi pendapatan menurut Bank Dunia:

1. Kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total pendapatan, maka termasuk dalam tingkat ketimpangan tinggi.
2. Kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12% - 17% dari total pendapatannya, maka termasuk dalam tingkat ketimpangan sedang.
3. Kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan, maka termasuk ke dalam tingkat ketimpangan rendah.

b. Hubungan *gini ratio* terhadap kemiskinan

Todaro dan Smith (2011) menjelaskan bahwa dalam tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern, pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang tinggi, distribusi pendapatan yang kurang merata tidak akan ada perubahan dalam tingkat kemiskinan. *Gini ratio* diukur secara grafis dengan membagi bidang yang terletak diantara garis pemerataan sempurna dan kurva lorenz dengan bidang yang terletak di bagian kanan garis pemerataan dalam diagram lorenz. Semakin tinggi nilai *gini ratio* semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah *gini ratio* maka semakin rendah pula distribusi pendapatan. Machmud (2016) menjelaskan bahwa tidak meratanya distribusi pendapatan dapat memicu ketimpangan pendapat yang merupakan awal dari munculnya kemiskinan.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut BPS IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah yang dihitung melalui perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Konsep IPM di pertama dipublikasikan *United National Development Program* (UNDP) melalui *Human Development Report* pada tahun 1996 dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Secara spesifik UNDP dalam Setiawan, Hakim dan Abdul (2013) menetapkan empat elemen utama dalam

pembangunan manusia yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equility*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*).

a. Komponen – komponen IPM

IPM dibangun atas tiga dimensi dengan indikator sebagai alat ukurnya, berikut ini adalah komponen – komponen Indeks Pembangunan Manusia:

- Dimensi umur panjang dan sehat

UNDP menjelaskan bahwa indikator umur harapan hidup saat lahir sebagai proxy dimensi umur panjang dan sehat. Umur harapan hidup adalah sebagai rata – rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

- Dimensi pengetahuan

Dimensi pengetahuan dan pencapaian pendidikan penduduk diukur dengan menggunakan indikator yaitu harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah.

- Dimensi standar hidup layak

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diterima oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi. Untuk mengukur standar hidup layak di Indonesia menurut BPS menggunakan rata – rata pengeluaran per kapita setahun yang disesuaikan.

b. Hubungan IPM terhadap kemiskinan

Dalam teori pertumbuhan dijelaskan bahwa peran pemerintah dalam peningkatan pembangunan modal manusia sangat penting. Dilihat dari investasi pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas manusia yang terbukti dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Di sektor informal keterampilan seseorang mampu meningkatkan hasil produktivitas dengan tenaga kerja yang terampil. Jika seseorang memiliki keterampilan atau keahlian khusus maka bisa meningkatkan kesejahteraan dalam hidup sehingga secara tidak langsung berdampak pada meningkatkan pendapatan dan konsumsi.

2.1.5. Inflasi

Menurut Mankiw (2006) inflasi adalah kecenderungan naiknya harga – harga barang secara terus – menerus. Dalam teori kuantitas menjelaskan bahwa sumber utama dari inflasi yaitu adanya kelebihan permintaan (*demand*) konsumsi sehingga mengakibatkan uang yang beredar dimasyarakat bertambah banyak. Sedangkan Dalam Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi diakibatkan masyarakat memiliki permintaan yang besar dibandingkan jumlah uang yang tersedia. Teori Struktural disebabkan oleh perubahan atau penambahan produksi barang terlalu lambat dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan kelangkaan devisa dan menaikinya harga barang.

Adapaun jenis – jenis inflasi menurut tingkat keparahannya dalam Boediono (1985) adalah sebagai berikut:

a. Moderate inflation

Keadaan inflasi yang ditandai dengan harga – harga yang meningkat secara lambat. Nilai inflasi ini dibawah 10% per tahunnya.

b. Galloping inflation

Inflasi ini ditandai dengan naiknya harga – harga barang secara cepat dan relatif besar. Inflasi ini disebut inflasi dua digit. Inflasi ini cukup membahayakan perekonomian, inflasi ini menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Inflasi ini berkisar 10% – 30% per tahun.

c. Hyper inflation

Keadaan inflasi yang ditandai dengan naiknya harga secara drastis hingga mengacaukan keadaan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung di bank karena bunga bank jauh lebih kecil dari laju inflasi. . Tingkat inflasi berada di kisaran 30% - 100% per tahun.

a. Indikator untuk mengukur tingkat inflasi

Menurut *website* resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi berdasarkan *international best price* antara lain:

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Indeks*)

Perubahan IHK menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa yang ditentukan dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (www.bi.go.id) Inflasi diukur dengan IHK di Indonesia mencakup 7 kelompok pengeluaran berdasarkan *the classification of individual*

consumption by purpose-COICOP yaitu: kelompok bahan makanan, makan jadi, tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan olahraga serta transportasi dan komunikasi. BPS (2022) laju inflasi dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$LI = \frac{IHK \text{ tahun ke } (n) - IHK \text{ tahun ke } (n-1)}{IHK \text{ tahun ke } (n-1)}$$

Keterangan :

LI = Laju inflasi periode t

IHK tahun ke (n) = Indeks Harga Konsumen periode ini

IHK tahun ke (n-1) = Indeks Harga Konsumen periode tahun sebelumnya

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Harga transaksi yang terjadi antar penjual pasar besar pertama dengan pembeli besar dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas disebut harga pedagang besar dari suatu komoditas.

3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

Deflator PDB menggambarkan ukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang di produksi dalam suatu perekonomian (negeri). Deflafor PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal (atas dasar harga berlaku) dengan PDB riil (atas dasar harga konstan). Angka deflator produk domestik bruto (GNP deflator) dapat dirumuskan sebagai berikut (www.bi.go.id):

$$AD = \frac{Y_b}{Y_k}$$

AD = Angka deflator produk domestik bruto (PDB)

Yb = Produk Nasional Bruto menurut harga berlaku

Yk = Produk Nasional Bruto menurut harga konstan

Laju inflasi di hitung sebagai beriku:

$$LI_t = \frac{AD_t - AD_{t-1}}{AD_{t-1}}$$

Keterangan :

LI_t = Laju inflasi pada periode t

AD_t = Angka deflator PNB pada periode ini

AD_{t-1} = Angka deflator PNB pada periode lalu

Kelemahan dari pendekatan ini yaitu sulit memperoleh angka deflator per bulan, triwulan atau semester sehingga hanya mempunyai deflator dari laju inflasi tahunan.

b. Hubungan inflasi terhadap kemiskinan

Inflasi dalam suatu negara atau daerah memiliki tingkat yang berbeda – beda. Dalam jangka pendek inflasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam jangka panjang tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak buruk bagi perekonomian. Tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan harga barang impor. Harga yang lebih mahal menurunkan daya saing produk domestik yang menyebabkan barang impor naik sehingga berdampak kepada rendahnya permintaan terhadap produk dalam

negeri. Dengan demikian maka perusahaan akan cenderung mengurangi produk dan ketika produk berkurang akan berimbas kepada pengurangan pekerja sehingga beberapa orang akan kehilangan pekerjaan.

2.1.5. Pengangguran

Menurut BPS pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau penduduk yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno (1994) pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum bisa mendapatkannya. Faktor utama terjadinya pengangguran disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat. Artinya pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, namun keuntungan akan diperoleh jika pengusaha menjual barang dan jasa yang di produksi. Apabila semakin besar permintaan, maka semakin besar juga barang dan jasa yang di produksi. Sehingga, kenaikan jumlah produksi akan menambah penggunaan tenaga kerja.

a. Jenis – jenis pengangguran

Sukirno (2000) berdasarkan penyebabnya pengangguran dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pengangguran alamiah

Pengangguran alamiah terjadi ketika seluruh kapasitas produksi yang tersedia tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada atau disebut

dengan kesempatan kerja yang penuh. Kesempatan kerja penuh (*full employment*) adalah keadaan dimana seseorang sekitar 95 persen dari angkatan kerja mampu dan bersedia dalam suatu waktu sepenuhnya untuk bekerja. Pengangguran sebanyak 5 dari 95 persen ini yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.

2. Pengangguran friksional

Pengangguran ini adalah bersifat sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi dan kondisi antara pencari kerja dengan penerima lowongan kerja. Mereka yang menganggur bukan karena tidak mendapat pekerjaan tetapi mereka meninggalkan pekerjaannya demi mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

3. Pengangguran struktural

Penyebab pengangguran ini adalah perkembangan teknologi, kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dan kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat pertumbuhan pesat di kawasan lain.

4. Pengangguran kongjungtur

Pengangguran ini disebabkan oleh perkembangan perubahan gelombang kehidupan ekonomi. ketika perekonomian mengalami masalah resesi dan depresi yang berakibat pada pengangguran dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja sehingga muncul pengangguran kongjungtur.

Jenis – jenis pengangguran terbuka berdasarkan cirinya:

1. Pengangguran terbuka

Menurut BPS pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi belum atau tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran ini diakibatkan oleh penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja, akibat banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

2. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini disebabkan oleh lebihnya tenaga kerja dalam satu unit yang diperlukan, sedangkan dengan mengurangi jumlah pekerja tertentu tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor industri dan jasa.

3. Pengangguran musiman

Pengangguran yang terjadi di masa – masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini sering terjadi di sektor pertanian biasanya petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan akan kembali bekerja ketika sudah musim panen.

4. Setengah menganggur

Pengangguran ini adalah seseorang yang tidak bekerja secara optimal dan hanya bekerja dibawah jam kerja normal karena tidak adanya lapangan pekerjaan.

b. Hubungan pengangguran terhadap kemiskinan

Menurut Sukirno (2004) pengaruh negatif pengangguran terhadap kemiskinan adalah berkurangnya tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang dikarenakan pendapatan masyarakat yang berkurang karena tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran tentu akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan seseorang karena tidak memiliki pendapatan yang akan meningkatkan peluang untuk terjebak di dalam kemiskinan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) penelitian mengenai analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari BPS data yang digunakan berupa data panel yang terdiri dari data *time series* periode 2013 – 2017 dan data *cross section* dari 33 provinsi di Indonesia. Pengolahan data dengan analisis jalur *software WarpPLS 5.0*. hasil penelitian menunjukkan IPM berpengaruh secara langsung dan negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengangguran dapat memediasi antara IPM dengan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga memediasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan.

Dalam penelitian Budhijana (2019) analisis pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2000 – 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

dengan data sekunder di Indonesia dari tahun 2000 – 2017. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. (2) variabel IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. (3) variabel pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Novianto (2018) melakukan penelitian bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Metode analisis data panel sebagai alat pengolahan data yang digunakan *Eview 9*. Data yang digunakan kombinasi antara data *time series* tahun 2011 – 2016 dan *cross section* dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Model yang dipilih dalam metode ini adalah *model random effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. IPM berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Inflasi berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Secara bersama (simultan) pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Fauza (2020) pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemiskina dan inflasi yang telah diolah BPS Provinsi Aceh tahun 2000 – 2008. Model analisis yang digunakan

analisis linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dan inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara simultan pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Selanjutnya penelitian Supraba (2018) melakukan penelitian analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2015. Menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Data terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo pada periode 2007 – 2015. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda yang dibantu dengan *software Eviews 8*. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Putro, Mintarti dan Wijaya (2017) dalam penelitian analisis determinasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dalam penelitian ini menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2007 – 2015. Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan hasil analisis variabel belanja modal pemerintah, IPM dan ketimpangan pendapatan *gini ratio* secara bersama – sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel antara PDRB.

Penelitian dengan tujuan mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Sitanggang (2020). Data sekunder yang diperoleh dari BPS dengan *cross section* 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan *time series* selama 5 tahun. Model analisis data panel dengan *Fixed Effect Model*. Data diolah menggunakan *Eviews 9*. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel *gini ratio* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan variabel tingkat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk dan IPM secara bersama – sama dan signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.